

DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel makro ekonomi lainnya, seperti :

1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
2. Pola persebaran sumber daya
3. Distribusi pendapatan

Pengeluaran pemerintah berasal dari pajak yang di perolehnya. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi variabel-variabel diatas, karena pengeluaran pemerintah bila di salurkan secara tepat akan meningkatkan perekonomian di suatu negara. Misalnya pembangunan proyek pemerintah seperti pembangunan jalan tol, akan mengurangi masalah kemacetan. Selain itu, sumber daya yang tadinya hanya terpusat di daerah tertentu saja dapat diatasi dengan di bangunnya fasilitas-fasilitas penting yang dibutuhkan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah juga mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Karena penghasilan yang diperoleh karyawan/pegawai negeri termasuk dalam catatan pengeluaran pemerintah. (Nurhadi, 2001)

Terjadinya trade-off antara pencapaian stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka pendek merupakan dampak dilematis dari pengambilan keputusan untuk melakukan kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia.

Permasalahan inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dan ditujukan guna mengetahui dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia. (Mankiw, 2007)

Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara yang dapat dilihat dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran maupun jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai oleh pengeluaran negara. Pada dasarnya sumber – sumber penerimaan negara berasal dari pajak – pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri. Sedangkan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. (Mankiw, 2007)

Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara akan diperoleh surplus atau defisit APBN. Dimana apabila hasil yang diperoleh surplus dalam APBN, maka terjadi efek kontraksi dalam perekonomian yang besarnya tergantung pada efek surplus tersebut. Surplus tersebut akan digunakan untuk membayar hutang pemerintah. Sedangkan bila yang terjadi adalah defisit, maka defisit tersebut dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri atau dengan pinjaman dalam negeri. Sumber – sumber pinjaman dalam negeri diperoleh dalam bentuk pinjaman perbankan dan non perbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara dan privatisasi. Dalam hal defisit dibiayai oleh pinjaman luar negeri akan menimbulkan tekanan inflasi, apabila pinjaman luar negeri dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri sedangkan jika dipergunakan untuk membeli barang – barang impor tidak akan menimbulkan tekanan inflasi. (Mishkin, 2009)

1. Dampak Positif: Kebijakan anggaran defisit dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena semakin banyaknya [uang](#) yang beredar pada masyarakat, khususnya pegawai pemerintah. Kebijakan ini umumnya dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi. Dengan kebijakan anggaran defisit pemerintah dapat memberi [stimulus](#) pada perekonomian dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan [investasi](#) pemerintah di bidang [investasi](#) publik (jalan raya, jembatan, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya). Dengan kata lain, jika fasilitas umum sangat memadai maka kegiatan ekonomi akan semakin cepat dan mudah sehingga memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi. (Aroef, 2009)
2. Dampak Negatif: Bila terjadi defisit anggaran yang sangat besar dan tidak segera diatasi pemerintah, maka akan terjadi gangguan serius pada kondisi keuangan pemerintah, bahkan bukan tidak mungkin pemerintah bisa mengalami gagal bayar ([default](#)) atas surat-surat utang yang diterbitkannya. Pengalaman di banyak negara, untuk memulihkan ekonomi [dari](#) risiko *default* dengan menarik utang baru dengan konsekuensi nominal utang bertambah banyak, beban APBN meningkat dan kelangsungan fiskal ([fiscal sustainability](#)) terganggu. (Aroef, 2009)

Frederic S. Mishkin. 2009. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Jakarta: Salemba Empat

N. Gregory Mankiw. 2007. Makroekonomi Ed.6. Jakarta: Erlangga

Matthias Aroef. 2009. Grand Techno-Economic Strategy. Bandung. PT Mizan Pustaka